



## Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Ranah Politik

Annisa Sabilla<sup>1</sup>, Dinie Anggraeni Dewi<sup>2</sup>

Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Pendidikan Indonesia  
[annisabilla@upi.edu](mailto:annisabilla@upi.edu), [dinieanggraenidewi@upi.edu](mailto:dinieanggraenidewi@upi.edu)

### Abstract

*This study aims to build the latest meaning of Pancasila values in political life in Indonesia. The method used in this study uses a qualitative approach. Sources and data obtained through literature studies from journals and research that has been previously conducted by other researchers. These sources and data are then studied with relevant theories. The results obtained from the research conducted are that the values contained in each Pancasila precept are able to give new ideas to Indonesian political life. Healthy and smart politics and capable of making Indonesia a safe, orderly and harmonious country. However, this can only be realized if all existing values are properly interpreted and implemented by all Indonesian citizens. By upholding and living the values of Pancasila, it really needs to be done. This is none other than for the sake of the survival of the nation and state of Indonesia.*

**Keyword:** Pancasila, values, politic

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemaknaan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi mutakhir dalam kehidupan politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber dan data yang ada diperoleh melalui studi literatur dari jurnal-jurnal dan penelitian yang telah sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain. Sumber-sumber dan data tersebut kemudian dikaji dengan menganalisis teori-teori yang relevan. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila Pancasila mampu memberi pedoman dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. Politik yang sehat dan cerdas serta mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, tertib dan harmonis. Namun hal tersebut hanya dapat terwujud jika setiap nilai-nilai yang ada dimaknai dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karenanya penegakkan dan penghidupan nilai-nilai Pancasila sangat perlu dilakukan. Hal ini tidak lain demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, Nilai-Nilai, Politik

---

## **PENDAHULUAN**

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kegiatan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Tak terkecuali dalam kegiatan perpolitikan Indonesia. Karena politik memegang peranan penting terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adhayanto (2015), menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara terbukti mampu menjadi media pemersatu bangsa. Mengingat selama perjalanan hidup negara Indonesia, seringkali diwarnai oleh politik yang mencerai-beraikan persatuan. Masyarakat menjadi saling curiga, saling membenci dan akhirnya berujung pada perpecahan. Politik menjadi penyulut yang sangat ampuh untuk memecah belah bangsa dan negara. Politik disalahgunakan menjadi suatu alat untuk mendirikan kekuasaan yang absolut dan menindas. Pemerintah pun kehilangan kepercayaan masyarakat dan kesulitan untuk kembali memamerkan karismanya sebagai pemegang amanah negara.

Tak hanya itu, hal yang lebih menakutkan adalah politik yang tidak sehat itu bahkan mengancam eksistensi negara yang telah melenceng pada tujuan negara. Politik ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi. Tujuan yang hendak dicapai bersama seolah musnah dalam ingatan. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat harga yang dibayar untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat sangatlah mahal. Perlu perjuangan dan pengorbanan yang tak terkira untuk membayarnya. Akhirnya politik seringkali menjadi suatu momok yang hina dan dibenci.

Oleh karena itu untuk mengatasi hal ini, Pancasila menjadi

solusi mutakhir dalam pengembalian arah dan tujuan bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum haruslah dihidupkan kembali dalam jiwa-jiwa bangsa. Dan dengan pengimplemtasian nilai-nilai Pancasila lah cara untuk menghidupkannya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan secara kualitatif. Teori-teori yang dirujuk dipilih sesuai dengan topik yang relevan. Sumber-sumber data diambil melalui studi literatur. Data- data yang ada diolah dengan menganalisis teori-teori dan penelitian dari peneliti sebelumnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pancasila**

Arti Pancasila dapat dipandang dari berbagai perspektif. Setiap perspektif ini memberikan gambaran kronologis mengenai pembentukan Pancasila. Selain itu, setiap perspektif juga saling mendukung serta membentuk pemaknaan dan pemfungsian Pancasila.

Secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa sansekerta. Bahasa suci umat Hindu yang biasa digunakan oleh para Brahmana yang berarti lima dasar. Sedangkan dari sudut pandang agama Budha, Pancasila berarti lima larangan. Lalu pada perkembangannya, pancasila menjadi bahasa Jawa kuno yang esensinya tetap terjaga yaitu sebagai lima aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Selanjutnya secara historis istilah Pancasila digunakan untuk menamai dasar negara Indonesia. Pengistilahan ini pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ir. Soekarno memberi istilah Pancasila terhadap dasar negara dengan arti lima dasar. Dasar yang menjadi pijakan dalam membentuk negara Indonesia yang merdeka. Dan sejak saat itulah istilah Pancasila menjadi bahasa Indonesia.

Sedangkan secara terminologis Pancasila merupakan dasar negara yang sah dan benar secara konstitusional. Pengesahan ini dilakukan oleh PPKI sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Meski dalam perkembangannya, rumusan Pancasila mengalami beberapa perubahan dan perbedaan. Hal ini terjadi sebagai dampak dari perubahan ketatanegaraan Indonesia. Namun akhirnya melalui ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 ditegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. (Adi, 2015 : 22-27).

### **B. Pengertian Politik**

Politik seringkali dimaknai sebagai suatu sistem pengatur atau taktik yang kotor dan licik. Hal ini tentunya merupakan kekeliruan yang besar. Namun memang tidak bisa ditampik bahwasanya aktor yang memerankan politik lah yang menjadikan politik sesuatu yang kotor. Oleh karena itu, pemahaman akan apa itu politik perlu diketahui.

Politik menurut Deliar Noer (Nambo dan Paluhulua, 2005 : 265) adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Politik berkaitan erat dengan kekuasaan. Seseorang yang memiliki atau mengingini suatu kekuasaan akan mempengaruhi orang lain dengan berpolitik untuk mewujudkan tujuannya. Dalam usaha pencapaian tujuan itu, diperlukan politik yang mampu mengetuk setiap hati manusia, mengubah cara pikir, dan membentuk keyakinan baru pada masyarakat. Dan untuk dapat berhasil melakukannya, diperlukan kekuasaan yang kuat. Jika telah melakukan perubahan pada masyarakat, maka

politik yang dilakukan dianggap berhasil.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo, M., Soesono, N., dan Evaquarta, R., bahwa kekuasaan dan wewenang memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan-tujuan. Kekuasaan berfungsi untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi.

Sementara menurut pakar lainnya yaitu Miriam Budiardjo (Nambo dan Paluhulua, 2005 : 265), politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dari definisi ini, politik berisi kegiatan atau perilaku manusia. Kegiatan-kegiatan itu dapat berupa pengaturan masyarakat, perumusan kebijakan dan segala hal lainnya untuk mencapai tujuan.

Politik diperlukan untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dengan adanya politik yang cerdas dan sehat maka tujuan itu akan mudah dicapai tanpa menghadirkan konflik yang berarti. Meskipun pastinya dalam perjalanan mewujudkan tujuan itu, akan ditemui konflik di dalam masyarakat atau bahkan di antara pelaksana politik itu. Hal ini terjadi sebagai reaksi kecil dari adanya politik. Dimana, pendapat maupun ideologi setiap manusia secara tidak langsung akan dituntut untuk mengikuti satu paham yang telah ditentukan.

Pada dasarnya politik selalu berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dinamis dan berkembang, sebisa mungkin menyesuaikan dirinya dengan sekitarnya. Maka dari itu, manusia terikat pada nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. (Nambo dan Paluhulua, 2005 : 262).

### C. Politik Indonesia dari Masa ke Masa

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pembangunan negara. Banyak hal yang dilewati dan banyak perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan. Penderitaan masyarakat juga menjadi taruhan untuk mencapai tujuan. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam perjalanannya juga, Indonesia mengalami banyak perubahan ketatanegaraan. Perubahan ketatanegaraan ini berdampak pula pada perubahan sistem politik. Seiring dengan perubahan ini, masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan gejala yang ada. Bertahan dalam konflik yang timbul, serta berharap pada harapan baru.

Namun seiring berkembangnya jaman, sudah banyak masyarakat mulai memahami pola politik yang berlaku. Pada masa pasca kemerdekaan, masyarakat menyadari bahwa politik pada masa itu menjadi permulaan dari pemerintahan yang kacau. Pemerintah silih berganti, dan kabinet datang dan pergi. Partai-partai politik menunjukkan ketidak kompakannya dalam pemerintahan. Saling menjatuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan golongan. Menanggapi ketidakefektifan sistem demokrasi parlementer yang berlaku pada masa itu, maka dibuatlah sistem demokrasi terpimpin. Sistem yang dibuat oleh presiden Ir. Soekarno bersama-sama dengan militer.

Setelah demokrasi terpimpin ini berakhir, dilanjutkan dengan masa orde baru. Sistem politik dimana militer terjun ke dalam pemerintahan. Hal ini memang kelanjutan dari demokrasi terpimpin yang menganggap bahwa para politisi tidak cakap mengurus negara sehingga militer sampai harus turun tangan. Namun dalam perjalanannya kekuasaan yang ada dalam sistem politik orde baru kehilangan batasannya. Kekuasaan yang berlaku menjadi absolut dan otoriter. Pemerintahan dipegang

sepenuhnya oleh penguasa. Tentu, kekuasaan ini bertentangan dengan demokrasi. Kekuasaan ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang menyedihkan. Pembungkaman pendapat menjadi hal yang mendasari keterbelakangan rakyat. Akhirnya pada tahun 1998 terjadi perlawanan terhadap rezim ini.

Selanjutnya sistem politik pada masa orde baru digantikan dengan sistem demokrasi presidensial yang diimbangi dengan sistem multi partai untuk benar-benar mengawasi kinerja presiden. Pada masa ini partai politik bermunculan sebagai wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kehidupan masyarakat pun semakin membaik.

Namun ternyata pada masa ini kekuasaan absolut pada masa lalu mulai menjelma dalam bentuk lain. Seperti yang dikemukakan oleh Purnaweni (2004 : 123), "Berbagai upaya untuk membangun sentralisasi otoritas dengan mobilisasi simbol-simbol karisma politik mulai dilakukan, dalam rangka memberikan kesan bahwa telah lahir sebuah potensi kepemimpinan baru yang sangat layak untuk memimpin Indonesia ke depan". Dominasi politik oleh penguasa bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat. Namun politik yang mampu memberikan kemerdekaan bagi dua pihak.

Pada masa ini pun seiring perkembangan teknologi, masyarakat diresahkan dengan panggung politik yang berada di media sosial. Berbagai pertikaian antar pelaku politik hanya menciptakan perpecahan dan ketegangan. Sungguh hal yang tidak etik bagi pelaku politik yang memiliki mandat untuk memimpin negara.

Dari ketidakstabilan politik Indonesia tersebut, terdapat dua penyebab yang mendasarinya. Seperti yang dikemukakan oleh Anggara, S (2015 : 24) penyebab ketidakstabilan politik Indonesia adalah:

1. Falsafah tidak besar pengaruhnya terhadap sistem politik dan politisi.

2. Belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan mendukung cita-cita negara.

Berdasarkan hal tersebut, penghidupan Pancasila dalam perpolitikan Indonesia sangat perlu dilakukan demi mencapai cita-cita dan tujuan negara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pancasila yang Solutif**

Melihat berbagai sistem politik yang tidak stabil itu, diperlukan suatu metode yang tepat untuk mengembalikan politik sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Politik yang sehat dan menjunjung persatuanlah yang dibutuhkan. Politik yang berlandaskan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi kerusuhan dalam politik Indonesia. Sebagai suatu ideologi, Pancasila dibentuk melalui kajian kritis yang berkaitan dengan cita-cita dan kepribadian bangsa. Selain sebagai suatu ideologi, Pancasila juga merupakan sebuah falsafah hidup. Falsafah hidup yang memberikan pedoman cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Pancasila bersifat memaksa dan mengikat. Pancasila bersifat memaksa karena wajib ditaati sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan, hukum negara dan pemerintahan haruslah berlandaskan Pancasila. Semuanya dibentuk tanpa sedikitpun melenceng dari Pancasila. Selain itu, Pancasila juga bersifat mengikat. Artinya, setiap warga negara Indonesia terikat pada keharusan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Namun hal ini agak berbeda dengan sifat Pancasila yang memaksa, dimana Pancasila yang mengikat tidak memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak menjadikannya sebagai pandangan

hidup. Kemultifungsian Pancasila ini haruslah benar-benar diimplementasikan kedalam berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi jiwa yang menghidupkan kesatuan bangsa.

Dalam upaya pengimplementasiannya, diperlukan pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena yang sering terjadi adalah salah paham akan makna yang terkandung dalam Pancasila. Pemahaman yang buntu akan Pancasila ini membawa kemunduran dalam kebhinekaan. Seringkali Pancasila diklaim sebagai ideologi yang berat sebelah. Berpihak pada golongan tertentu saja. Padahal dalam pembentukannya saja, Pancasila menghadirkan berbagai suku, agama dan berbagai latar belakang yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman nilai-nilai Pancasila perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

### **B. Implementasi Pancasila dalam Ranah Politik Indonesia.**

Dalam rangka mewujudkan politik sehat, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diinternalisasikan dalam setiapkegiatan politik. Baik politik yang dilakukan oleh pemerintahan negara, maupun politik yang dilakukan oleh organisasi, lembaga, bahkan perorangan. Jika semua warga negara memahami nilai-nilai itu dan menginternalisasikannya, maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan berjalan harmonis. Berikut akan dijabarkan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik.

#### **1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa setiap warga negara harus memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan. Dengan keyakinan yang kuat, kehidupan yang berpedoman pada agama pun akan mengantarkan manusia pada kehidupan yang harmonis dengan manusia lainnya. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam tiap agama

sesungguhnya merupakan ajaran yang baik dan menyeru pada kebaikan. Saling menyayangi, menghormati, dan menghargai sesama, itulah yang diajarkan agama.

Kegiatan politik pun jika berlandaskan pada agama akan berjalan baik dan minim konflik. Dengan adanya saling menghargai dan menyayangi itu, kekuasaan yang dipegang siapapun akan diterima bersama-sama dengan baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa penguasa yang paling berkuasa adalah Tuhan semata. Sehingga siapapun yang memiliki mandat sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan dijalankan sebaik-baiknya.

Selaras dengan hal ini, Budiardjo (Haryanti, A dan Pujilestari, 2019 : 7), mengemukakan bahwa kekuasaan bersifat luas. Yang artinya manusia merupakan subjek sekaligus subjek dari kekuasaan. Hal ini dicontohkan misalnya seorang Presiden sebagai subjek kekuasaan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, tetap harus tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku (objek kekuasaan).

Dengan keyakinan akan kekuasaan Tuhan juga, pemimpin yang memegang kekuasaan tidak akan berbuat sesukanya, sekehendaknya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyatnya. Sehingga pemimpin yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan selalu berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyatnya. Seperti halnya korupsi, KKN dan berbagai perbuatan tak merugikan lainnya.

Begitupun dengan rakyatnya. Rakyat yang berkeyakinan kuat kepada Tuhannya akan menerima keputusan dari pemimpinnya. Karena rakyat pun yakin, Tuhan memilih pemimpinnya sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kecemburuan-kecemburuan yang terjadi antar pelaku politik akan mudah diatasi. Hal ini dapat terwujud dengan baik jika kedua belah pihak sama-sama

memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Jika salah satu saja yang memiliki keyakinan kuat itu, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan baik.

## **2. Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab**

Pada Sila kedua ini, telah dicantumkan dengan jelas bahwasanya setiap kegiatan politik untuk bangsa dan negara harus mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya mampu menjadi pengingat terhadap pelaksanaan politik di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang yang memanusiaikan manusia, serta bangsa berkeadilan.

Rasa kemanusiaan harus terus dipupuk, dipelihara dan dikelola dengan baik. Karena dengan adanya rasa kemanusiaan, praktik-praktik politik yang licik dan merugikan manusia lainnya akan minim terjadi. Penguasa tidak akan mau mengorbankan rakyatnya demi keuntungan pribadi. Dan rakyat tidak akan menjatuhkan penguasanya yang adil. Rasa kemanusiaan ini agaknya kian hari kian berkurang. Terlihat dari maraknya berita palsu, fitnah, saling menghujat antar warga negara demi hanya untuk menduduki suatu kekuasaan. Dapat dibayangkan, jika dalam upaya perolehan posisi di pemerintahan saja sudah berani mengesampingkan rasa kemanusiaan, apalagi jika nantinya telah menduduki posisi itu. Pemimpin yang otoriter, kabinet yang ricuh, rakyat yang tertindas dan tak berdaya akan menjadi plot yang menyedihkan dalam perjalanan negara Indonesia.

## **3. Sila Persatuan Indonesia**

Dalam sila ketiga ini juga, persatuan merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Negara dengan keberagaman yang luar biasa kaya ini memerlukan persatuan yang kuat. Tentunya persatuan yang kuat sangat diperlukan jika eksistensi bangsa Indonesia ingin terus ada.

Keberagaman yang kaya ini dapat menjadi sebuah keuntungan sekaligus boomerang tersendiri. Keberagaman yang dikelola dengan baik menggunakan tali pengikat yaitu berupa toleransi akan menjadi katalisator dalam kemajuan negara Indonesia. Berbagai Keragaman itu bisa membentuk ide-ide dan gagasan yang sangat bagus jika dikelola dengan baik. Politik yang terjadi dengan menggunakan toleransi akan melahirkan suatu hasil yang indah. Layaknya pelangi dengan berbagai warna itu diatur menurut aturan tertentu. Kehidupan yang harmonis akan tercipta jika keragaman itu dimaknai sebagai sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Namun sebaliknya yang akan terjadi jika keberagaman tidak dikelola dengan baik. Pertikaian, pertengkar, hingga peperangan dapat terjadi. Ketidakmampuan dalam memaknai keberagaman itu akan memecah belah bangsa Indonesia dengan mudah. Jika persatuan ini terus saja diabaikan dan tidak dikelola, maka umur dari bangsa Indonesia tidak akan bertahan lama. Peperangan Antar suku, agama, ideologi dapat terjadi dengan mudah. Mungkin saja Bangsa Indonesia hanya tinggal nama. Apalagi jika keberagaman ini masuk ke ranah politik maka pihak yang berkuasa akan mengendalikan sepenuhnya kekuasaan tanpa memperhatikan toleransi lagi.

#### **4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Permusyawaratan/Perwakilan ini ditegaskan pula bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Widodo (2015: 680), mengemukakan bahwa kedaulatan rakyat merupakan esensi dari demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa atas negara Indonesia. Itu artinya seluruh rakyat juga berhak untuk menjadi pemimpin di pemerintahan.

Indonesia yang memakai sistem pemerintahan demokrasi juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi rakyat yang ingin memasuki pemerintahan. Namun dalam prakteknya pemerintahan tidaklah dipimpin oleh seluruh rakyat yang ada dari Sabang hingga Merauke. Tetapi dilakukan oleh perwakilan-perwakilan tiap daerah. Para wakil-wakil itulah yang akan menyampaikan aspirasi rakyat.

Sayangnya dalam kenyataan di lapangan, para wakil-wakil ini tidak menjalankan amanah yang diembannya dengan baik. Kekuasaan yang diperoleh seolah menghipnotis tujuan awal yaitu penyambung lidah rakyat. Seringkali ditemui wakil-wakil rakyat yang memberikan janji-janji palsu. Hal seperti inilah yang akhirnya membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Politik pun hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan yang sepihak. Kekuasaan yang hanya memberikan keuntungan pribadi.

Kepekaan sosial, rasa kemanusiaan dan keyakinan yang kuat lagi-lagi harus dimiliki setiap warga negara. Tidak hanya dimiliki, tetapi dihidupkan. Terus hidup dan bertumbuh sehingga kekuasaan tidak lagi menghipnotis para wakil rakyat untuk menjalankan amanahnya.

Selain itu, dalam sila keempat ini terdapat nilai perwakilan. Nilai perwakilan ini salah satunya mewujudkan pada sistem otonomi daerah. Daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Yang dalam hal ini gubernur dan pemerintahan provinsi menjadi wakil dari pemerintahan pusat di daerah.

Namun sejak tahun 2000, terjadi permasalahan pada sistem otonomi daerah ini. Terjadi ketidakharmonisan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Ketidakharmonisan ini pun berdampak pada banyak aspek. Salah satunya adalah banyaknya perda yang bermasalah.

Seperti yang diungkapkan oleh Hadi (2010 : 16), bahwa ketidakharmonisan yang tejadian antara Bupati/Walikota dengan Gubernur lebih banyak dikarenakan aspek politik, seperti misalnya perbedaan partai politik, agama, keyakinan, suku dan lain-lain.

Maka dari itu, pemahaman akan nilai perwakilan, kerakyatan dan persatuan dari sila keempat ini sangat perlu dilakukan. Tidak hanya rakyat biasa, para penguasa seperti bupati, walikota dan Gubernur harus memahami hal ini. Caranya dengan menerima, menghormati, dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Juga mengetahui dan memahami tugas dan fungsi masing-masing. Sehingga sistem perwakilan itu berjalan dengan baik.

## 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan, lagi-lagi menjadi aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan yang adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya adil bagi para penguasa. Inilah yang harus dipahami. Bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap kebijakan yang dibuat jika berasaskan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia maka tidak akan ada rakyat yang protes terhadap pemerintah. Semua kebijakan yang berkeadilan akan diterima dengan baik. Membentuk keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sumber dari segala sumber hukum haruslah dihidupkan kembali. Caranya adalah dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa setiap warga negara harus memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan. Pada sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil

dan Beradab. Rasa kemanusiaan menjadi harus terus dipupuk, dipelihara dan dikelola dengan baik. Dengan adanya rasa kemanusiaan, praktik-praktik politik yang merugikan dan tidak berkeadilan akan terhindarkan. Ketiga Sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia harus terus diperkuat mengingat keberagaman yang ada di Indonesia bisa menjadi suatu keuntungan sekaligus boomerang jika tidak dikelola dengan baik. Keempat Sila Kerakyatan yang Dipimpin Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila ini memerlukan rasa kemanusiaan, kepekaan sosial, serta keyakinan yang kuat untuk menjadi wakil rakyat begitupun menjadi rakyat agar kepercayaan dapat terbentuk. Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam Sila ini, keadilan sosial benar-benar harus ditegakkan. yakni keadilan yang adil bagi kedua pihak antar pemerintah dan rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No. 2.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1). CV Pustaka Setia.
- Budiardjo, M., Soeseno, N., & Evaquarta, R. *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). *Politik lokal di Indonesia: Dari otokratik ke reformasi politik*. Jurnal Ilmu Politik. Edisi, 21, 2010.
- Hadi, K. (2010). *Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Politik, Vol. I, No. 2.
- Haryanti, A., & Lestari, Y. P. (2019). *Sistem Politik Indonesia*.
- Nambo, A. B., & Puluhalawa, M. R. (2005). *Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu*

- telaah dari sistem politik*).  
MIMBAR: Jurnal Sosial Dan  
Pembangunan, 21(2), 262-285.
- Purnaweni, H. (2004). *Demokrasi  
Indonesia: Dari masa ke masa*.  
Jurnal Administrasi Publik Vol 3  
No. 2, UNPAR, 2004., 3.
- Purwoko, P. *Sistem Politik dan  
Pemerintahan Indonesia Setelah  
Reformasi*. *Politika: Jurnal Ilmu  
Politik*, 1(1), 104-117.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan  
pilkada berdasarkan asas  
demokrasi dan nilai-nilai  
pancasila. *CIVIS*, 5(1/Januari).